

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Muhammad akhmar, Fathu Rahman, Supratman, Husain Hasyim, M. Nawir “Panduan Pembelajaran Budaya Ekologis Masyarakat Adat To Cerekang”, (Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2021).
- Bewa Ragawino, “pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia” (bandung, 2008).
- Boedi harsono, ”hukum agrarian Indonesia”, ed ( Pontianak: TOP Indonesia, 2016).
- Budi Winarno, Kebijakan Publik, teori, proses dari studi kasus.
- Hilman syahrial Haq, “pengantar hukum adat Indonesia”, ed 1(jateng: lakeisha,2019).
- Ida Zuraida, “Teknik Penyusunan Peraturan Daerah”, (Jakarta, Sinar Grafika,2012).
- Imam Sudiart, “asas-asas hukum adat pengantar, (yogyakarta: liberti Yogyakarta,1991).
- Julius Sembiring : dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat, (Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta: STPN Press, Agustus 2018).
- Kusumadi Pudjosewojo, “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta:aksara baru,1976).
- R. Siti Zuhro, Lilis Mulyani dan Fitria, “Kisruh Peraturan Daerah : Mengurangi Masalah & Solusinya”, (Yogyakarta: Penerbit Ombak. Tahun 2010).
- R. Van Dijk pengantar hukum adat Indonesia,( sumur bandung 1971).
- Rosdalina Bukido, “Hukum Adat”, ed 1 (yogjakarta: Deepublish, 2017).
- Siska Lis Sulistiani, “Hukum Adat di Indonesia”, (Jakarta timur: sinar grafika,2021).
- Soepomo, “Hukum Adat”.(Jakarta: PT Pradnya Paramita 1993).
- Soerjono soekanto,” pengantar penelitian hukum” ( Jakarta: UI press, 1980).
- Sukardi, “sistem hukum di Indonesia”, ed. 1. ( Pontianak : TOP Indonesia, 2016).
- Suparno, implementasi kebijakan public dalam praktek, (sidoardjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017).
- Suparno, Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek, sidoardjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Tachjan, implementasi kebijakan publik , ed 1( Bandung: AIPI Bandung, 2006).

### Jurnal

- 123dok, luwu timur dalam angka “Topografi, Geohidrologi, Geologi, dan Klimatologi” <https://123dok.com/article/topografi-geohidrologi-geologi-dan-klimatologi.zgd1wo2z>.(Diakses Pada tanggal 28 januari 2024)
- Adhilah Yustisianty Umar, “Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya”, (mamuju: 2019).

- Bilikmisteri “mengenal budaya dan tradisi cerekang”  
<https://www.bilikmisteri.web.id/1778/mengenal-budaya-dan-manusia-cerekang.html>,(Diakses pada 10-10-2023)
- BPS Kabupaten Luwu Timur, “kabupaten Luwu Timur dalam angka 2023”  
[www.luwutimurkab.bps.go.id](http://www.luwutimurkab.bps.go.id). hlm. 8, (Diakses tanggal 22 Januari 2024).
- Caroline Tresnoputri, Jessica Chandra, Fico Acchedya Wijaya, Jennifer Claudia, Cherlyne Baby Florencia, Jeane Neltje Saly, “Peran Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11588>, (Diakses pada 18-12-2023).
- Fai,”apa itu hukum adat”,16 november 2021 <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/> (Diakses pada18-12-2023).
- Hadijah Azis K, Taskur ,” kearifan lokal masyarakat adat cerekang dalam menjaga dan melestarikan hutan adat di desa manurung kabupaten luwu timur”  
<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/bonita/article/view/498>, (Diakses pada 19-10- 2021).
- Imam Santoso, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup”, (Universitas Negeri Semarang 2015).
- Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani, Nallom Kurniawan,”Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Dimahkama Konstitusi”,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=download.penelitian&id=11>,  
 (Diakses pada 18-12-2023).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan” (diakses pada tanggal 22 januari 2024)
- Lisa Aditya Musa, Hardianto, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo’(Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa), 6.1 (2020).
- M. Aries Djaenuri. Enceng, “Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah”,  
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf> (Diakses pada 13-9- 2023).
- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, “Gografis” 1 agustus 2019  
[https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang\\_/geografis](https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang_/geografis). (Diakses pada 28 januari 2024).
- Qur’an Kemenag “Al Hujurat [13] : 49”, Al Qur’an Kemenag, 2023,  
<https://quran.kemenag.go.id/>, (Diakses pada 25 Februari 2024).
- Septya Hanung Surya Dewi,I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,Fatma Ulfatun Najicha,” kedudukan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat”,

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322> ,(Diakses pada 5-10-2023).

- Suparno, implementasi kebijakan public dalam praktek, (sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hlm 15.
- Wawan Rahmadi, 2022, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Mamuju” Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar,20,(Diakes pada 20 oktober 2023)

## **UNDANG-UNDANG**

- Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang 1945.
- Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Agraria.
- PERDA No 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur.
- SK 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## **WAWANCARA**

- Ir Hj. Harisa Suharjo, Ketua Komisi 1 DPRD Luwu Timur, Wawancara pribadi, Malili, 24 Januari 2024 Pukul 14.00 WITA.
- Tuguiat, S.Ag, Anggota Komisi I DPRD Luwu Timur, wawancara pribadi, Malili, 24 Januari 2024 Pukul 13.10 WITA.
- Ir. Abdul Kanal, Sekertaris komisi I DPRD Luwu Timur, wawancara pribadi, Malili, 24 januari 2024 Pukul 13.30 WITA.
- Esti Purwaningsih S.Si, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Wawancara Pribadi, Malili, 24 januari Pukul 15.00 WITA.
- Irwan Jafar, Kepala Desa Manurung, Wawancara Pribadi, Manurung, 1 Februari Pukul 14.00 WITA.
- Usman Siabeng, Ketua Lembaga Adat Desa Manurung (To Cerekang), Wawancara pribadi, Manurung, 1 Februari 2024 Pukul 14.50 WITA.
- Fitri Mangari, Sekertaris Desa Manurung, Wawancara Pribadi, Manurung, 1 Februari Pukul 13.00 Wita.
- Rizal, Kepala Dudun Cerekang, Wawancara Pribadi Manurung 1 juni 2024 pukul 11.00 WITA.